

2025

Minggu ke-4 September
(22 s.d. 28 September 2025)

Isu Sepekan

Bidang Kesra, Komisi IX



BADAN KEAHLIAN
DPR RI

Bridging research to parliament
Evidence based policy making

HARI PARU SEDUNIA: MOMENTUM EMAS TINGKATKAN KESADARAN KESEHATAN PARU

Nur Sholikah Putri Suni

Analis Legislatif Ahli Muda

nur.suni@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kesehatan paru merupakan aspek fundamental bagi ketahanan tubuh, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat. Fungsi paru tidak hanya mendukung sistem pernapasan, tetapi juga berperan vital dalam sirkulasi oksigen ke jaringan dan organ tubuh agar tetap optimal. Namun, penyakit pernapasan akut maupun kronis masih menjadi ancaman serius dan kerap disebut "silent killer" karena gejalanya sering diabaikan, meski berdampak pada peningkatan morbiditas, risiko kematian, dan biaya pengobatan.

Peringatan hari Paru Sedunia setiap 25 September menjadi momentum strategis bagi DPR RI untuk memperkuat kebijakan dan program pelindungan kesehatan paru. Indonesia menghadapi beban penyakit paru yang besar seperti, pneumonia lebih dari 300.000 kasus dengan 50.000 kematian per tahun, kanker paru lebih dari 30.000 kasus baru per tahun, serta tingginya prevalensi penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan asma. World Health Organization (WHO) mencatat empat dari sepuluh penyebab kematian tertinggi di dunia adalah penyakit paru (PPOK, pneumonia, kanker paru, dan tuberkulosis) dengan lebih dari 3 juta kematian akibat PPOK setiap tahun. Kanker paru bahkan membunuh 1,8 juta orang per tahun secara global, dengan tren peningkatan pada kelompok bukan perokok, terutama perempuan.

Kasus penyakit paru juga berada pada tingkat mengkhawatirkan secara lokal. Di DKI Jakarta, jumlah kasus ISPA tercatat 293.852 pada Maret 2025 dan meski menurun menjadi 172.206 pada Juni 2025, angka ini tetap tergolong tinggi dan mencerminkan situasi yang perlu mendapat perhatian serius. Data September 2025 menunjukkan konsentrasi rata-rata PM_{2,5} di Jakarta mencapai 68 µg/m³, jauh melampaui ambang panduan kualitas udara sehat yang direkomendasikan WHO (5 µg/m³). Kasus penyakit paru noninfeksi juga meningkat di Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat 2.500 kasus dalam tiga tahun terakhir akibat paparan asap rokok dan polusi udara. Faktor risiko utama maraknya penyakit paru di Indonesia antara lain, tingginya konsumsi rokok, paparan asap rokok lingkungan, kebakaran hutan dan lahan gambut, serta polusi udara dari kendaraan dan industri.

Peringatan global terhadap kesehatan paru menegaskan perlunya intervensi lintas sektor, meliputi kesehatan, lingkungan, transportasi, dan pendidikan. Tantangan yang dihadapi tidak hanya memastikan regulasi, pengawasan, dan kebijakan berjalan di tingkat nasional, tetapi juga menjamin pelaksanaannya secara konsisten di daerah. Namun, perbedaan kapasitas pemerintah daerah dalam memantau kualitas udara dan menyediakan layanan kesehatan paru, terbatasnya infrastruktur pengukuran udara di banyak kota, serta lemahnya data *real-time* menjadi hambatan serius dalam merespons masalah kesehatan paru. Di sisi lain, pengendalian emisi industri dan kendaraan di wilayah padat penduduk juga menuntut kerja sama yang lebih kuat di tengah mobilitas dan urbanisasi yang meningkat.

2025

Minggu ke-4 September
(22 s.d. 28 September 2025)

Isu Sepekan
Bidang Kesra, Komisi IX

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan upaya terpadu berupa perluasan edukasi masyarakat tentang faktor risiko paru, percepatan program preventif seperti imunisasi, penapisan kesehatan, penguatan standar emisi, pengendalian konsumsi rokok, kenaikan cukai rokok, serta penerapan kawasan tanpa rokok. Kolaborasi erat antarkementerian terkait dan kemitraan dengan tenaga kesehatan, serta masyarakat menjadi kunci agar kebijakan kesehatan paru terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

Dengan paru yang sehat, kualitas hidup masyarakat akan terjaga. Momentum hari Paru Sedunia hendaknya dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran, komitmen kebijakan, dan tindakan nyata dalam melindungi kesehatan paru masyarakat Indonesia.

Atensi DPR

Komisi IX DPR RI memiliki peran strategis untuk mengarusutamakan kesehatan paru melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, Komisi IX DPR RI perlu mendorong revisi atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas, salah satunya mengenai pengendalian konsumsi rokok. Penguatan regulasi ini akan menjadi fondasi bagi pelindungan kesehatan paru yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pada fungsi anggaran, Komisi IX DPR RI dapat memperjuangkan alokasi dana khusus untuk memperkuat fasilitas layanan kesehatan paru di daerah, serta mendukung program pencegahan seperti imunisasi, penapisan dini penyakit paru, dan edukasi publik mengenai faktor risiko paru. Pada fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI dapat meminta pemerintah menyampaikan laporan berkala tentang evaluasi implementasi kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Mekanisme pengawasan yang kuat akan memastikan kebijakan berjalan sesuai target dan tepat sasaran. Dengan atensi yang berkesinambungan, Komisi IX DPR RI tidak hanya meningkatkan kesadaran nasional tentang pentingnya paru-paru sehat, tetapi juga mendorong lahirnya kebijakan nyata yang melindungi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Sumber

kompas.id, 27 September 2025;
kumparan.com, 19 Juli 2025;
liputan6.com, 22 September 2025; dan
mediaindonesia.com, 25 September 2025.



EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making